ABSTRAKSI

Syarat-syarat berdirinya suatu negara antara lain mempunyai penduduk, wilayah, dan kedaulatan. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan daratan. Maka batas-batas wilayah yang dimiliki, baik itu antar propinsi maupun batas wilayah dengan negara lain, berbentuk perbatasan laut dan perbatasan darat.

Salah satu wilayah Indonesia yang berbentuk perbatasan darat, yaitu perbatasan antar negara adalah yang terletak di Kalimantan Barat dan Sarawak (salah satu negara bagian Malaysia). Di perbatasan ini terdapat pintu-pintu penghubung yang menghubungkan semua kegiatan kerjasama antara negara Indonesia dan Malaysia khususnya, serta penghubung secara tidak langsung antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

Pintu penghubung di Kalimantan Barat dan Sarawak ini disebut sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (Indonesia) yang terletak di Entikong, dan Pos Imigresen (Sarawak) yang terletak di Tebedu. Pos-pos ini berfungsi sebagai pos pemeriksaan keluar-masuknya orang, barang dan kendaraan yang melintas antar negara tersebut, atau yang dikenal dengan istilah CIQ (Custom, Immigration and Quarantine).

Sebagai pintu terdepan yang berfungsi sebagai penyaring segala hal yang akan masuk ke negara, maka fasilitas-fasilitas pemeriksaan di pos pemeriksaan ini adalah hal yang paling penting. Selain itu fasilitas-fasilitas penunjang juga diperlukan sehubungan dengan situasi, kondisi dan kepentingan masing-masing negara.

Pelayanan yang cepat, dan lancar adalah hal yang paling mendasar di PPLB. Maka hal-hal yang tidak perlu atau tidak sesuai yang dapat mengganggu jalannya proses pemeriksaan diupayakan diminimalisasikan. Banyak cara untuk mengatasi hal tersebut. Dari sudut pandang arsitektur, program peruangan yang berkaitan dengan sirkulasi dapat turut menentukan kegiatan yang berlangsung didalamnya. Maka perencanaan dan perancangan yang tepat akan sangat mendukung berjalannya proses.